

Yang Kecil Diborgol, yang Besar Diajak Rapat

Api, emas, dan negara di hutan Sumatera, 12–24 Oktober 2026

Forest Guardian Indonesia

Catatan pemantau pekan ini

Pekan ini kami memantau tiga peristiwa yang di permukaan tampak terpisah. Di Tanjung Jabung Barat, Jambi, dua petani berusia 63 dan 65 tahun sudah ditahan di Rutan Polda Jambi sejak awal September karena kebakaran sekitar 10 hektare di dalam areal kerja sebuah perusahaan pemegang izin kehutanan.^[8] Di Sumatera Selatan, dari 52 tersangka karhutla yang diumumkan Polda per 15 Oktober, hanya satu yang terkait korporasi, yaitu direktur operasional sebuah perkebunan sawit di Ogan Komering Ilir.^{[1][2]} Di hulu Sungai Penetai, di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat, laporan tentang alat berat tambang emas ilegal sudah masuk ke polisi sejak Februari 2022 dan yang tertangkap saat itu adalah pekerja dan operator, sementara pemodalnya, menurut warga adat setempat, "tidak dikejar".^[28] Di Merauke, kajian WALHI mencatat 674 dari 807 titik panas di kawasan Proyek Strategis Nasional pangan dan energi berada di klaster yang diampu kementerian, dan tanggapan pemerintah sejauh ini adalah janji "pengetatan".^{[40][42]}

Ketiganya punya pola yang sama. Penegakan hukum bergerak cepat terhadap orang yang tubuhnya ada di lokasi kejadian: petani yang memasak di ladang, operator ekskavator, pendulang. Penegakan melambat begitu rantai tanggung jawab naik ke pemegang izin, pemodal, dan lembaga yang mengampu proyek. Frasa yang paling sering kami dengar untuk pola ini adalah "tajam ke bawah, tumpul ke atas", yang diucapkan Direktur WALHI Jambi Oscar Anugrah kepada BBC Indonesia.^[8] Pada 21 Oktober, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memakai frasa yang sama ketika mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan, dengan menyebutnya sebagai perintah Presiden agar penegakan hukum "tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas".^[7]

Tesis kami dalam edisi ini: masalahnya tidak terletak pada kosongnya aturan. Undang-undang sudah menyediakan tanggung jawab mutlak bagi usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, pidana korporasi, kewajiban pemegang izin mencegah kebakaran di areal

kerjanya, dan pidana khusus bagi orang yang mendanai perusakan hutan. Yang terjadi adalah pilihan penegakan: jalur yang paling mudah dibuktikan dipakai lebih dulu, dan jalur itu hampir selalu berujung pada orang kecil. Kami juga mencatat kemajuan dan “semoga” saja mereka melakukannya dengan benar. Tepatnya pada 21 Oktober Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengumumkan 11 tersangka korporasi karhutla secara nasional, naik dari sembilan sepekan sebelumnya.^{[6][10]} Dalam laporan kepada Presiden yang dirilis 23 Oktober, angkanya menjadi 13 korporasi per 20 Oktober; sebelas di antaranya, yang direkomendasikan dicabut izinnya, seluruhnya berada di Kalimantan.^[54] Sampai naskah ini ditutup pada 24 Oktober, nama korporasi tersebut belum dibuka, dan Jambi belum memiliki satu pun tersangka korporasi.^[5]

Edisi ini kami susun sebagai edisi tematik. Tiga isu dari Pantauan Mingguan 19 Oktober, kami baca bersama karena ketiganya berujung pada satu simpul hukum yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang tanggung jawab mutlak.

Konteks

Musim kebakaran 2026 dan angka yang belum lengkap

Data resmi terakhir yang tersedia di SiPongi, sistem pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan, mencatat 202.004,30 hektare areal terbakar pada Januari sampai Juli 2026, naik 69 persen dibanding periode yang sama tahun 2025.^[12] Angka ini belum mencakup Agustus sampai Oktober, bulan-bulan dengan asap paling pekat di Sumatera Selatan dan Jambi. Inisiatif Trase, dalam rilis 13 Oktober, menyebut Indonesia sedang menghadapi musim kebakaran terburuk dalam lebih dari satu dekade.^[44] Kami memakai angka SiPongi sebagai batas bawah, bukan sebagai total tahun 2026. Sebagai pembanding, Greenpeace Indonesia pada 22 Oktober menyebut analisis Nusantara Atlas mencatat sekitar 1,9 juta hektare areal terbakar pada Januari–September 2026. Metodenya berbeda, dan angka itu kami muat sebagai klaim Greenpeace, bukan data resmi.^[56]

Dampaknya terasa langsung di kota. Pada pertengahan Oktober jarak pandang di Palembang sempat turun ke 25 meter sebelum membaik setelah penyemaian es kering, metode yang menurut BPBD Sumatera Selatan masih uji coba.^[17] Pada 18 Oktober pagi masih terpantau 473 titik panas di Ogan Komering Ilir, sumber utama asap Palembang.^[16] Pada 22 Oktober BPBD mencatat 1.833 titik panas di Sumatera Selatan, 1.038 di antaranya di lahan gambut, dengan Ogan Komering Ilir sebagai penyumbang terbesar.^[18] Di Jambi, Dinas Kesehatan mencatat 26.957 kasus infeksi saluran pernapasan akut pada September 2026.^[13]

Tiga jalur penegakan

Negara punya tiga jalur untuk menanggapi kebakaran di konsesi. Jalur pidana dijalankan polisi dan penyidik Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup. Jalur administratif berupa teguran, pembekuan, dan pencabutan izin oleh kementerian pemberi izin. Jalur perdata berupa gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh negara. Ketiganya bisa berjalan bersamaan. Pekan ini jalur administratif paling aktif: Kementerian Kehutanan menyatakan sudah menjatuhkan tindakan administratif kepada 32 perusahaan dengan cakupan konsesi 1.931.115 hektare.^[7] Jalur pidana terhadap korporasi bergerak lebih lambat. Untuk jalur perdata, kami belum menemukan gugatan yang diumumkan atas kebakaran musim ini.

Lanskap Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) membentang seluas sekitar 1.389.509,867 hektare di empat provinsi: Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.^[37] Bersama Gunung Leuser dan Bukit Barisan Selatan, TNKS adalah bagian dari Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera yang sejak 2011 masuk Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya. Alasan resmi UNESCO saat itu adalah perburuan, pembalakan liar, perambahan pertanian, dan rencana pembangunan jalan.^[38] Tambang emas belum tercantum sebagai alasan pada 2011. Lima belas tahun kemudian, KKI Warsi mencatat tambang emas tanpa izin (PETI) di Jambi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, dari areal penggunaan lain sampai taman nasional.^[31]

Merauke dan api di lahan negara

Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Papua Selatan berstatus Proyek Strategis Nasional. Sebagian areanya dibuka untuk cetak sawah dan program pangan yang dikoordinasikan kementerian, sebagian lain diserahkan kepada perusahaan tebu dan bioetanol. Ketika titik panas muncul di area ini, pertanyaan "siapa pemegang izin" tidak berhenti pada perusahaan, karena sebagian lahannya diampu langsung oleh lembaga pemerintah.^{[40][41]}

Rekam kejadian

Tabel berikut merangkum peristiwa yang kami catat dari awal September sampai 23 Oktober 2026. Tanggal yang dicantumkan adalah tanggal peristiwa atau pernyataan, bukan tanggal terbit berita.

Tabel 1. Rekam kejadian, 2 September – 23 Oktober 2026

Tanggal	Peristiwa	Rujukan
2 Sep	Dua petani, MTN (63) dan AK (65), ditangkap di HPT Blok III Taman Raja, Tanjung Jabung Barat, di areal kerja PBPH PT Rimba Hutani Mas.	[9]
6 Sep	Gakkum Kehutanan menetapkan keduanya tersangka; keduanya ditahan di Rutan Polda Jambi.	[9]
29 Sep	Kemenhut mengumumkan tindakan terhadap 26 subjek hukum: 8 teguran, 13 pembekuan, 5 pencabutan; areal terbakar sekitar 10.958,77 ha di tujuh provinsi.	[11]
6 Okt	Longsor di lokasi tambang emas ilegal Jorong Jujutan, Solok Selatan; empat penambang tewas.	[32][33]
7 Okt	KLH menyatakan 12 perusahaan di Sumatera Selatan disegel; nama belum diumumkan.	[19]
9–10 Okt	Banjir dan longsor di Pesisir Selatan, termasuk Tapan; 20 rumah rusak berat setelah verifikasi BPBD.	[36]
12 Okt	Polda Jambi: 18 laporan polisi, 16 tersangka, tidak ada perkara korporasi dalam rincian. Menhut menjanjikan sanksi bagi 5–6 perusahaan lagi.	[4][24]
14 Okt	WALHI meluncurkan kajian "Siapa di Balik Api?". Bareskrim: 9 tersangka dalam perkara korporasi. DPRD Jambi mengkaji panitia khusus karhutla.	[40][10][22]
15 Okt	Polda Sumsel menetapkan Direktur Operasional PT RAS tersangka. Wamenko Pangan menanggapi temuan titik panas di PSN Merauke.	[1][42]
16 Okt	Polda Jambi: empat tersangka PETI di Bungo, dua terduga pemodal masih dikembangkan; penyelidikan dugaan PETI di Sungai Penetai. Polda Sumsel memasang garis polisi di 620,62 ha konsesi.	[25][27][20]
19 Okt	Gakkum Kehutanan: dua perusahaan di Jambi, PT REI dan PT ALN, dibekukan izinnya.	[23]
20 Okt	MK mendengar ahli dan saksi Pemohon perkara 307/PUU–XXIV/2026. Bupati Merauke menetapkan tanggap darurat asap untuk 22 distrik.	[48][43]
21 Okt	Polda Sumsel: korporasi yang disidik naik dari 16 menjadi 20, tersangka korporasi tetap satu. Menhut membekukan izin enam perusahaan di Kalteng. Kapolri: 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya PMA.	[3][7][6]

Tanggal	Peristiwa	Rujukan
22 Okt	BPBD Sumsel mencatat 1.833 titik panas, 1.038 di gambut.	[18]
23 Okt	Laporan Kapolri kepada Presiden dirilis: 13 korporasi tersangka per 20 Okt, 11 di antaranya di Kalimantan. Polda Sumsel memaparkan 20 korporasi yang disidik (inisial); tersangka korporasi tetap satu, areal disegel ±811,49 ha.	[54][55]

Aktor utama

Kami membagi aktor ke dalam empat kelompok: penegak hukum, kementerian pemberi izin, pihak yang berada di lokasi kejadian, dan masyarakat sipil yang menyediakan data tandingan. Nama perusahaan hanya kami tulis lengkap bila disebut dalam dokumen resmi atau oleh dua sumber independen. Selebihnya kami pakai inisial yang dipakai penegak hukum.

Tabel 2. Aktor utama dan posisinya pekan ini

Aktor	Peran	Posisi atau tindakan yang tercatat
Polda Sumatera Selatan (Kapolda Irjen Rony Samtana)	Penyidik pidana karhutla	20 korporasi disidik dan dipaparkan dengan inisial pada 23 Oktober; satu tersangka terkait korporasi (FS, Direktur Operasional PT RAS); areal disegel sekitar 811,49 ha. ^{[3][55]}
Polda Jambi (Kabid Humas Kombes Erlan Munaji; Dirreskrimsus Kombes Taufik Nurmandia)	Penyidik karhutla dan PETI	16 tersangka karhutla perorangan per 12 Oktober; empat tersangka PETI Bungo; penyelidikan Sungai Penetai. ^{[4][25][27]}
Bareskrim dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto	Koordinasi penyidikan nasional	13 tersangka korporasi per 20 Oktober, 11 di antaranya di Kalimantan; nama belum dibuka. ^{[6][54]}
Kementerian Kehutanan (Menhut Raja Juli Antoni; Dirjen Gakkum Dwi Januanto Nugroho)	Pemberi izin PBPH, penyidik kehutanan	32 perusahaan dikenai tindakan administratif; dua petani Jambi ditetapkan tersangka oleh Gakkum. ^{[7][9]}
Kementerian LH/BPLH (Wamen Diaz Hendropriyono)	Penyegelan, sanksi lingkungan	12 perusahaan disegel di Sumsel, nama belum diumumkan. ^[19]
Kemenko Pangan (Wamenko Hanif Faisol)	Pengampu klaster Food Estate	Temuan WALHI "akan menjadi perhatian pemerintah" dan akan ada "pengetatan". ^[42]

Aktor	Peran	Posisi atau tindakan yang tercatat
Nurofiq)	Merauke	
Balai Besar TNKS (Kepala Haidir)	Pengelola taman nasional	Mengakui enam titik PETI aktif dan "jaringan pemodalnya kuat". ^[28]
Pemegang izin di lokasi kebakaran	Wajib mencegah kebakaran di areal kerja	PT RAS (Sumsel) disangka tidak menyiapkan sarana-prasarana pengendalian; PT Rimba Hutani Mas (Jambi) akan diperiksa terkait tanggung jawab PBPH. ^{[3][9]}
Petani, pekerja, operator	Pelaku di lapangan	Dua petani lansia ditahan; operator dan pengawas tambang di Bungo jadi tersangka. ^{[8][25]}
WALHI, KKI Warsi, masyarakat adat Tamiai	Penyedia data tandingan dan pelapor	Data luas terbakar berbasis citra satelit; laporan alat berat di Sungai Penetai sejak 2022. ^{[13][14][28]}

Studi kasus

A. Api di konsesi: Sumatera Selatan dan Jambi

Siapa yang sudah menjadi tersangka? Pada 15 Oktober Kapolda Sumatera Selatan Irjen Rony Samtana memaparkan 58 perkara karhutla yang sudah masuk tahap penyidikan: 41 perkara perorangan dengan 51 tersangka, dan 17 perkara korporasi dengan satu tersangka.^[2] Tersangka itu berinisial FS, Direktur Operasional PT RAS, perusahaan perkebunan sawit dengan kebakaran sekitar 51,7 hektare di areal HGU-nya di Desa Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir.^{[2][21]} Menurut Kapolda, kebakaran di konsesi PT RAS terjadi berulang, dan modus yang disangkakan adalah perusahaan "tidak memiliki atau tidak menyiapkan peralatan dan sarana prasarana" pengendalian kebakaran sesuai standar peraturan menteri.^[3] Enam hari kemudian, 21 Oktober, Kapolda menyebut laporan polisi yang naik penyidikan bertambah menjadi 62, dan korporasi yang disidik bertambah dari 16 menjadi 20. Tersangka korporasi tetap satu, dan identitas empat korporasi tambahan belum dibuka: "Terkait identitasnya saya belum dapat, nanti akan kita rilis."^[3] Pada 23 Oktober Polda Sumsel memaparkan ke-20 korporasi itu per kabupaten, masih dalam bentuk inisial; tujuh di antaranya berada di Ogan Komering Ilir. Tersangka korporasi tetap satu, luas areal konsesi yang disegel naik menjadi sekitar 811,49 hektare, dan penyidik menyatakan memakai Pasal 108 dan Pasal 116 UU PPLH.^[55]

Polda Sumsel juga memasang garis polisi di konsesi seluas 620,62 hektare yang terindikasi terbakar, dengan pemeriksaan menara pantau, embung, alat pemadam, dan regu pemadam internal perusahaan.^[20] Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan sudah menyegel 12 perusahaan di Sumatera Selatan pada 7 Oktober. Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono saat itu mengaku tidak hafal nama-namanya, dan Gubernur Herman Deru berjanji daftarnya akan dipublikasikan.^[19] Dalam bahan yang kami baca sampai 24 Oktober, daftar itu belum terbit dan ini menjadi indikasi awal bagaimana mereka sedang berusaha merapikan temuan dan memperbaiki keadaan di kalangan per korporasian dan kasus api yang menimpa mereka.

Jambi: belum ada satu pun tersangka korporasi. Polda Jambi mencatat 18 laporan polisi dan 16 tersangka sampai 12 Oktober. Rincian per polres yang dipaparkan Kabid Humas Kombes Erlan Munaji tidak memuat satu pun perkara korporasi.^[4] Gubernur Jambi Al Haris, selaku Komandan Satgas, pada 18 Oktober menyebut 91 kasus (71 penyelidikan, 20 penyidikan) dan 18 tersangka, seluruhnya perorangan.^[5] Pada 19 Oktober Gakkum Kehutanan membekukan izin dua perusahaan di Jambi, yang hanya disebut dengan inisial PT REI dan PT ALN, karena "telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan".^[23] Ini sanksi administratif, bukan penetapan tersangka dan sampai hari ini kita melihat Pemerintah Provinsi Jambi merupakan aktor penanganan bencana Karhutla yang paling buruk, bahkan kepala daerahnya sendiri tidak mampu mengambil keputusan tegas atas apa yang menimpa provinsinya.

Dua petani di konsesi PBPH. Kasus yang paling jelas memperlihatkan arah penegakan di Jambi adalah kasus MTN dan AK. Keduanya ditangkap pada 2 September di Hutan Produksi Terbatas Blok III Taman Raja, Desa Lubuk Bernai, yang berada di areal kerja PBPH PT. Rimba Hutani Mas dan berfungsi sebagai kawasan lindung. Gakkum Kehutanan menetapkan keduanya tersangka pada 6 September, dan keduanya ditahan di Rutan Polda Jambi. Dalam rilis yang sama Gakkum menyatakan penyidik akan memeriksa PT Rimba Hutani Mas terkait tanggung jawabnya sebagai pemegang PBPH.^[9] BBC Indonesia melaporkan bahwa luas terbakar menurut analisis Gakkum sekitar 10,3 hektare, bahwa salah satu tersangka mengaku api berasal dari tungku memasak nasi, dan bahwa keluarga AK, yang menurut BBC menderita stroke dan sakit jantung, mengajukan penangguhan penahanan pada 15 September.^[8] Kami belum menemukan kabar hasil permohonan itu maupun hasil pemeriksaan terhadap perusahaan.

Pembandingnya ada dalam laporan yang sama. WALHI Jambi mencatat sekitar 5.488 hektare area terbakar berada di 11 konsesi pada periode 1 Januari–18 September 2026, dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pada 14 September menyatakan ada tiga perusahaan yang sedang didalami.^[8] Lima pekan kemudian status itu belum berubah menjadi penetapan tersangka.

Tabel 3. Tersangka perorangan dan tersangka terkait korporasi

Lembaga, tanggal data	Perkara	Tersangka perorangan	Tersangka terkait korporasi
Polda Sumsel, 15 Okt	58 penyidikan (41 perorangan, 17 korporasi)	51	1
Polda Sumsel, 21 Okt	62 penyidikan; 20 korporasi disidik	tidak dirinci	1
Polda Jambi, 12 Okt	18 laporan polisi	16	0
Satgas Jambi (Gubernur), data 16 Okt	91 kasus (20 penyidikan)	18	0
Bareskrim dan polda, data 13 Okt	273 LP perorangan; 98 LP korporasi	223	9
Kapolri, data 20 Okt	286 LP perorangan; 100 LP korporasi	243	13 (11 di Kalimantan)

Sumber: [2][3][4][5][10][6][54]. Pada data Bareskrim 13 Oktober, "sembilan tersangka" merujuk pada perkara yang melibatkan korporasi; sumber tidak merinci apakah tersangkanya badan hukum atau pengurus.

Apa yang ditunjukkan angka nasional. Data Bareskrim per 13 Oktober memungkinkan perbandingan yang lebih tajam. Perkara korporasi mencakup 25.600,26 hektare lahan terbakar dari 98 laporan polisi, dengan sembilan tersangka. Perkara perorangan mencakup 5.157,89 hektare dari 273 laporan polisi, dengan 223 tersangka.^[10] Dengan kata lain, perkara korporasi mencakup sekitar lima kali luas perkara perorangan, tetapi menghasilkan kurang dari seperdua puluh jumlah tersangkanya. Bila luas dibagi jumlah tersangka, setiap tersangka perorangan rata-rata berhadapan dengan sekitar 23 hektare, sedangkan setiap tersangka korporasi dengan sekitar 2.844 hektare (hitungan FGI). Saat itu baru tiga dari sepuluh polda yang menangani perkara korporasi telah menetapkan tersangka, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan; Sumatera Selatan dengan 17 laporan dan Jambi dengan 2 laporan belum.^[10]

Tabel 4. Luas lahan dan jumlah tersangka dalam data Bareskrim per 13 Oktober 2026

Kategori	Laporan polisi	Luas terbakar (ha)	Tersangka	Rata-rata ha per tersangka (hitungan FGI)
Perorangan	273	5.157,89	223	23,1

Kategori	Laporan polisi	Luas terbakar (ha)	Tersangka	Rata-rata ha per tersangka (hitungan FGI)
Korporasi	98	25.600,26	9	2.844,5

Data yang lebih baru tidak mengubah gambaran itu. Menurut laporan Kapolri per 20 Oktober, perkara perorangan mencakup 5.856 hektare dari 286 laporan polisi dengan 243 tersangka, sedangkan perkara korporasi mencakup 29.534,99 hektare dari 100 laporan dengan 13 tersangka. Rata-ratanya sekitar 24 hektare per tersangka perorangan dan sekitar 2.272 hektare per tersangka korporasi (hitungan FGI).^[54] Kenaikan dari 9 ke 13 tersangka korporasi adalah kabar baik, dan pada 19 Oktober Kapolri menyatakan penetapan tersangka, "baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya", akan dilakukan "dalam waktu yang dekat".^[6] Tetapi publik belum bisa menguji klaim itu karena nama korporasinya tidak disebut: "Nanti akan dijelaskan."^[6] Laporan Kapolri kepada Presiden yang dirilis 23 Oktober menjawab sebagian pertanyaan itu. Per 20 Oktober tercatat 100 laporan polisi korporasi dengan luas terbakar 29.534,99 hektare dan 13 korporasi tersangka. Sebelas di antaranya, yang direkomendasikan dicabut izinnya, berada di Kalimantan Barat (8), Kalimantan Tengah (2), dan Kalimantan Selatan (1), dengan luas konsesi 209.933 hektare dan areal terbakar 11.105,39 hektare. Dua tersangka lainnya berasal dari 71 laporan yang belum direkomendasikan cabut izin, dan Kapolri menyebut 22 korporasi terafiliasi modal asing.^[54] Artinya, perkara PT RAS di Sumatera Selatan tidak termasuk dalam sebelas korporasi itu; apakah termasuk dalam angka 13 tidak dijelaskan.

Sanksi administratif: bertambah, tetapi bukan pencabutan. Pada 29 September Kemenhut mengumumkan tindakan terhadap 26 subjek hukum. Rinciannya delapan teguran, 13 pembekuan izin, dan lima pencabutan PBPH, dengan areal terbakar sekitar 10.958,77 hektare di tujuh provinsi, termasuk 2.750,81 hektare di Sumatera Selatan dan 741,25 hektare di Jambi.^[11] Pada 12 Oktober Menhut menjanjikan "lima atau enam perusahaan lagi".^[24] Janji itu dipenuhi pada 21 Oktober dalam bentuk pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem terhadap enam perusahaan di Kalimantan Tengah, sehingga totalnya menjadi 32 perusahaan.^[7] Kami mencatat dua hal. Pertama, tambahan itu berupa pembekuan, bukan pencabutan. Kedua, siaran pers Gakkum 19 Oktober sudah menyebut angka 32 dengan susunan perusahaan Kalimantan Tengah yang berbeda dari siaran pers Menhut 21 Oktober.^{[23][7]} Selama kementerian belum menerbitkan satu daftar yang konsisten, publik sulit memastikan perusahaan mana saja yang terkena sanksi.

Angka luas terbakar yang tidak sepakat. Penegakan hukum bergantung pada seberapa luas kebakaran yang diakui. Di Jambi, perbedaan antara data pemerintah dan data masyarakat sipil sangat besar, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Luas kebakaran Jambi 2026 menurut berbagai sumber

Sumber	Periode atau tanggal data	Luas (ha)	Metode yang disebut
Satgas Karhutla Jambi	s.d. 6 Okt	4.267	tidak dirinci
Gubernur Jambi (Dansatgas)	1 Jan–16 Okt	4.363,86	tidak dirinci
Satgas Karhutla Jambi	s.d. 17 Okt	4.813,56	tidak dirinci
KKI Warsi	rilis 9–10 Okt	42.455	citra Sentinel-2
WALHI Jambi	s.d. 8 Okt	43.451	citra satelit, analisis GIS

Sumber: [13][14][5]. Dua angka pemerintah untuk 16 dan 17 Oktober dirilis pada hari yang sama dengan rincian per kabupaten yang berbeda.^[5]

Angka WALHI Jambi dan Warsi berbeda sekitar 1.000 hektare, tetapi keduanya hampir sepuluh kali lipat angka Satgas. WALHI Jambi juga mencatat 11.339 hektare kebakaran di Taman Nasional Berbak Sembilang, 2.134 hektare di antaranya di zona inti.^[13] Angka yang kecil membuat kebakaran tampak seperti kejadian lokal yang cukup ditangani dengan menangkap pelaku setempat. Angka yang besar mengarah pada pertanyaan tentang pengelolaan bentang gambut dan pemegang izinnya.

Peta titik panas di konsesi. WALHI Sumatera Selatan, dengan data SiPongi untuk periode 1 September–2 Oktober 2026, mencatat 22.690 titik panas di dalam konsesi: 10.411 di 18 konsesi PBPH atau HTI dan 12.279 di 63 konsesi perkebunan.^[15] WALHI sendiri menegaskan titik panas di konsesi tidak otomatis membuktikan perusahaan menjadi penyebab. Kami sepakat dengan penafian itu. Tetapi titik panas yang terkonsentrasi di konsesi adalah dasar yang cukup untuk memeriksa apakah pemegang izin menjalankan kewajiban pencegahannya, dan kewajiban itulah yang menjadi dasar penetapan tersangka PT RAS.

B. Emas di hulu: lanskap Kerinci Seblat

Empat tahun laporan di Sungai Penetai. Sungai Penetai mengalir di Kecamatan Batang Merangin, Kerinci, dan hulunya berada di dalam TNKS. Pada 10 Februari 2022 Lembaga Adat Depati Muaro Langkap bersurat ke Polda Jambi meminta penghentian tambang emas ilegal, dengan menyebut 13 alat berat beroperasi di sungai itu.^[28] Operasi demi operasi kemudian

digelar. Tabel berikut merangkum yang kami temukan dalam sumber yang dapat ditelusuri.

Tabel 6. Rekam penindakan PETI di Sungai Penetai dan sekitarnya, 2022–2026

Waktu	Peristiwa	Rujukan
10 Feb 2022	Surat Lembaga Adat Depati Muaro Langkap ke Polda Jambi; 13 alat berat disebut.	[28]
Agu 2022	Dua orang ditangkap.	[28]
28 Nov 2022	Operasi terpadu Polres Kerinci; alat berat tidak ditemukan dan diperkirakan sudah keluar tiga hari sebelumnya; empat orang diamankan; Kapolres mengakui informasi operasi bocor.	[29]
12 Sep 2023	Lima pekerja ditangkap; warga memblokir jalan Bangko–Kerinci.	[30][28]
14 Mar 2024	PN Sungai Penuh memvonis kelima penambang tujuh bulan penjara dan denda Rp2,5 juta, menurut Mongabay.	[28]
Jan 2024	Analisis FWI yang dimuat Kompas.com: tambang emas merusak sekitar 105 ha hutan taman nasional, mayoritas di DAS Penetai.	[34]
23 Jun 2026	Operasi gabungan Polres Pesisir Selatan dan TNKS di hulu Batang Penadah, Tapan: 7 mesin dan 37 tenda dimusnahkan, pemilik tidak diketahui.	[35]
Jul 2026	BBTNKS menertibkan tiga lokasi (Sungai Serpih, Tapan, Painan); pelaku tidak ditemukan, peralatan dimusnahkan.	[39]
16 Okt 2026	Polda Jambi menyelidiki dugaan PETI skala besar di Sungai Penetai setelah video beredar; status lokasi di TNKS "masih perlu dipastikan".	[27]

Pola yang terlihat adalah lokasi kosong saat petugas datang dan pekerja kecil yang tertangkap. Kepala Balai Besar TNKS Haidir kepada Mongabay mengakui enam titik tambang aktif di Sungai Liki, Sungai Maliki, Sungai Mesumai, hulu dan hilir Air Penetai, serta Sungai Serpeh, dengan luas "sekitar 30 hektar". Ia menyebut "pelaku yang kita hadapi banyak, jaringan pemodalnya kuat", menyatakan tambang sempat berhenti lima bulan setelah penangkapan 2023 lalu beroperasi lagi, dan tidak menampik indikasi keterkaitan oknum aparat.^[28] Hazrun, warga adat Tamiai, menyampaikannya lebih ringkas: "yang ketangkap, yang pendulangnya, bosnya tidak dikejar."^[28]

Angka luas kerusakan di dalam taman nasional berbeda menurut sumber: sekitar 30 hektare tambang aktif menurut Kepala BBTNKS, 105 hektare menurut analisis FWI untuk DAS Penetai, dan lebih dari 1.250 hektare TNKS menurut laporan Warsi akhir 2025 yang dikutip

Mongabay.^{[28][34]} Cakupan dan metodenya berbeda, sehingga kami tidak menjumlahkannya atau menyusunnya sebagai tren. Yang dapat dikatakan, perbedaan antara angka pengelola kawasan dan angka pemantau independen mencapai puluhan kali lipat.

Bungo: operator ditetapkan tersangka, pemodal masih inisial. Pada 16 Oktober Polda Jambi mengumumkan pengungkapan PETI di Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Bungo. Lokasi ini tidak disebut berada di dalam TNKS. ANTARA melaporkan empat tersangka: AJ (36) sebagai pengawas, HS (34) dan MF (19) sebagai operator, dan SAH (22) sebagai pembantu operator, dengan dua ekskavator disita. Menurut Dirreskrimsus Kombes Taufik Nurmandia, penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap dua orang yang diduga menjadi pemodal, berinisial FY alias AG dan Z alias C.^[25] Rilis resmi Polda menyebut tiga tersangka pada laporan pertama, dengan AJ juga tersangka pada laporan kedua, dan menyebut "pihak lain yang disebut sebagai pemodal" tanpa inisial.^[26] Pasal yang dipakai adalah Pasal 158 UU Minerba tentang penambangan tanpa izin.^[25] Sampai 24 Oktober kami tidak menemukan kabar penangkapan terduga pemodal.

Pasal 158 menjerat orang yang menambang. Untuk menjerat orang yang membiayai, hukum menyediakan jalur lain yang lebih berat, yang kami bahas di bagian hukum. Selama penyidikan berhenti pada Pasal 158, hasil yang paling mungkin adalah vonis bagi operator dan pengawas.

Solok Selatan: dua keterangan pejabat yang bertentangan. Pada 6 Oktober dini hari empat penambang tewas tertimbun longsor tebing di lokasi tambang emas ilegal di Jorong Jujutan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan.^[32] Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi menyatakan "tidak ada alat berat atau PC di lokasi tersebut" dan para korban menambang secara tradisional seperti mendulang.^[32] Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Heriyanto menyatakan sebaliknya: saat kejadian ada aktivitas PETI dengan ekskavator, dan korban adalah warga yang mendulang material yang dikeruk alat berat.^[33] Catatan Polres sendiri menunjukkan bahwa pada 11 Juni 2026 Satgas Polres Solok Selatan menyita satu ekskavator di Jorong Jujutan, sementara orang di lokasi melarikan diri.^[45] Penyitaan bulan Juni tidak membuktikan ada alat berat pada 6 Oktober, tetapi menunjukkan bahwa alat berat pernah beroperasi di jorong yang sama. Perbedaan keterangan ini penting karena menentukan siapa yang dicari: pendulang, atau pemilik ekskavator dan pemodalnya.

Banjir Tapan: pertanyaan yang belum dijawab kajian. Banjir dan longsor 9–10 Oktober di Pesisir Selatan merusak berat 20 rumah dan memutus air PDAM.^[36] Semua pejabat yang kami baca menyebut hujan deras sebagai pemicu. Kami belum menemukan kajian atau pernyataan resmi yang mengaitkan banjir ini dengan tambang atau pembalakan di hulu. Kami mencatat satu fakta yang relevan: pada 23 Juni 2026 petugas TNKS dan Polres Pesisir Selatan memusnahkan tujuh

mesin dan 37 tenda tambang emas ilegal di hulu Sungai Batang Penadah, Tapan.^[35] Apakah aktivitas di hulu itu menambah daya rusak banjir adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan kajian hidrologi, bukan dengan dugaan.

Kasus pembanding: api di lahan yang diampu negara

Kasus pembanding ini kami ambil di luar wilayah fokus Sumatera, karena memperlihatkan bentuk lain dari pola yang sama: ketika pengampu lahan adalah lembaga negara, siapa yang diperiksa?

807 titik panas di PSN Merauke. Kajian WALHI "Siapa di Balik Api?" yang diluncurkan 14 Oktober mencatat 807 titik panas di Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke pada 1 Januari–31 Agustus 2026. Sebanyak 133 titik berada pada enam entitas Energy Estate yang menurut WALHI terafiliasi dengan First Resources dan Wilmar. Sebanyak 674 titik berada di empat klaster Food Estate yang secara kelembagaan diampu Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.^{[40][41]}

Tabel 7. Sebaran 807 titik panas di PSN Merauke menurut WALHI, Januari–Agustus 2026

Area	Pengampu atau afiliasi menurut WALHI	Titik panas
Food Estate Klaster 4	Kemenko Pangan	236
Food Estate Klaster 1	Kemenko Pangan	179
Food Estate Klaster 2	Kemenko Pangan	172
Food Estate Klaster 5	Kementerian Pertanian	87
Subtotal Food Estate		674
PT Global Papua Abadi	First Resources	57
PT Murni Nusantara Mandiri	Wilmar	40
PT Andalan Manis Nusantara	First Resources	23
PT Semesta Gula Nusantara	First Resources	10
PT Sejahtera Gula Nusantara	Wilmar	2
PT Agrindo Gula Nusantara	Wilmar	1

Area	Pengampu atau afiliasi menurut WALHI	Titik panas
Subtotal Energy Estate		133
Total		807

Sumber: [40][41]. Ringkasan eksekutif PDF kajian menulis 90 titik untuk Energy Estate; angka itu adalah subtotal tiga entitas First Resources. Tabel isi kajian dan siaran pers WALHI memuat 133.

WALHI menyertakan penafian yang perlu dikutip utuh: keterkaitan kepemilikan dan keberadaan titik panas "bukan dengan sendirinya bukti bahwa suatu perusahaan atau individu melakukan pembakaran", dan temuan itu harus menjadi dasar penyelidikan, pemeriksaan lapangan, dan pengujian pertanggungjawaban.^[40] Hal yang sama berlaku bagi klaster pemerintah: 674 titik di area yang diampu kementerian bukan bukti bahwa kementerian membakar. Tetapi menurut WALHI, respons kebijakan dan penegakan hukum di kawasan ini perlu menjangkau korporasi pemegang konsesi dan lembaga pemerintah yang mengampu proyek, alih-alih membatasi akuntabilitas pada aktor korporasi.^[41]

Tanggapan pemerintah: janji pengetatan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup, menanggapi pada 15 Oktober bahwa temuan itu "akan menjadi perhatian pemerintah" dan akan ada pengetatan. Ia juga menyatakan program pangan di Papua Selatan berbeda dari proyek lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah pada 1990-an karena telah didahului kajian lingkungan hidup strategis.^[42] Kemenko Pangan adalah salah satu pengampu klaster yang disorot WALHI. Dalam bahan yang kami baca sampai 24 Oktober, tidak ada penyegelan, pemeriksaan, atau tanggapan rinci dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Pertanian atas 674 titik tersebut. Pada 20 Oktober Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menetapkan status tanggap darurat asap karhutla untuk 22 distrik.^[43]

Mengapa ini pembanding yang penting. Dalam kasus Sumatera, kewajiban pencegahan kebakaran melekat pada pemegang izin, dan penyidik sudah memakainya untuk PT RAS. Dalam kasus Merauke, sebagian lahan tidak dipegang perusahaan melainkan diampu lembaga negara yang juga berwenang mengawasi. Ketika pengampu dan pengawas berada di dalam pemerintahan yang sama, mekanisme pemeriksaan yang biasa dipakai terhadap korporasi tidak berjalan dengan sendirinya. Rantai pasok juga patut dicatat: Trase dan Auriga memperkirakan pasar domestik terhubung dengan dua pertiga deforestasi akibat sawit di Indonesia pada 2024, dan deforestasi sawit di Papua naik dari 3.600 hektare pada 2024 menjadi 7.300 hektare pada 2025.^[44] Tekanan untuk membuka lahan tidak hanya datang dari ekspor.

Hukum: apa yang diatur dan apa yang tidak

Bagian ini membandingkan aturan yang tersedia dengan cara aturan itu dipakai pekan ini. Ancaman pidana dalam undang-undang sektoral telah disesuaikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang antara lain menghapus pidana minimum khusus untuk banyak tindak pidana dan mengubah denda menjadi kategori KUHP. Karena itu kami tidak mencantumkan angka ancaman pidana lama sebagai ancaman yang berlaku.

Pasal 88 UU PPLH dan perkara di Mahkamah Konstitusi

Pasal 88 UU 32/2009 versi asli menyatakan setiap orang yang usahanya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup "bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".^[46] UU 6/2023 tentang Cipta Kerja mengubah kalimat itu menjadi "bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya". Frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" hilang dari batang tubuh, sementara Penjelasan Pasal 88 tetap menyatakan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.^[47]

Tanggung jawab mutlak adalah alat paling kuat negara dan warga untuk menggugat ganti rugi dan pemulihan dari pemegang konsesi yang terbakar, karena penggugat tidak perlu membuktikan siapa yang menyalakan api. Menurut kami, kebakaran gambut yang berulang di konsesi sesuai dengan gambaran "ancaman serius terhadap lingkungan hidup" dalam pasal ini. Bila frasa kuncinya hanya tersisa di Penjelasan, pemegang konsesi punya ruang untuk berargumen bahwa kesalahan tetap harus dibuktikan.

Pasal ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara 307/PUU-XXIV/2026, yang diajukan Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan bersama empat pemohon perorangan. Pemohon meminta Pasal 88 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai tanggung jawab atas kerugian "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dan tanpa harus didahului pembuktian pelanggaran hukum.^[49] Pada sidang 5 Oktober, Pemerintah berpendapat penghapusan frasa itu merupakan penyederhanaan dan Penjelasan Pasal 88 masih menyatakan kesalahan tidak perlu dibuktikan. Pada sidang 12 Oktober, Komnas Perempuan sebagai Pihak Terkait mendukung pemaknaan bersyarat.^[49] Sidang 20 Oktober mendengar dua ahli Pemohon, Bivitri Susanti dan Suraya Abdulwahab Afiff, serta dua saksi dari Poco Leok dan Poso. Sidang berikutnya dijadwalkan Senin, 2 November 2026, untuk mendengar ahli dan saksi Pemerintah.^[48] Perkara ini juga menguji empat norma lain di luar Pasal 88, termasuk partisipasi dalam amdal dan Bank Tanah.

Kami membaca perkara ini sebagai simpul dari ketiga isu edisi ini. Bila MK menegaskan tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan, gugatan perdata atas kebakaran di konsesi Sumatera Selatan, Jambi, dan klaster PSN Merauke menjadi lebih mudah diajukan. Bila tidak, beban pembuktian tetap berada pada penggugat.

Peta aturan dan celah pemakaiannya

Tabel 8. Ketentuan yang tersedia dan pemakaiannya pekan ini

Ketentuan	Apa yang diatur	Yang kami catat dalam praktik
UU 32/2009 Pasal 88 (diubah UU 6/2023)	Tanggung jawab mutlak atas kerugian dari usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. ^{[46][47]}	Kami belum menemukan gugatan perdata yang diumumkan untuk musim kebakaran 2026; frasa kunci sedang diuji di MK.
UU 32/2009 Pasal 116–119	Pidana bagi badan usaha dan/atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan; pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, penutupan usaha, perbaikan akibat, dan pengampuan. ^[46]	Di Sumsel yang ditetapkan tersangka adalah direktur operasional; status badan hukum PT RAS tidak dijelaskan dalam sumber yang kami baca.
UU 41/1999 Pasal 49 (diubah UU 6/2023)	Pemegang hak atau perizinan berusaha wajib mencegah kebakaran dan bertanggung jawab atas kebakaran di areal kerjanya. ^{[47][51]}	Dua petani ditahan atas kebakaran di areal PBPH; pemeriksaan pemegang PBPH dijanjikan, hasilnya belum diumumkan.
UU 39/2014 Pasal 56 ayat (2)	Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran.	Dasar yang secara substansi dipakai untuk PT RAS: perusahaan disangka tidak menyiapkan sarana-prasarana. ^[3]
Perma 13/2016 Pasal 4 ayat (2)	Hakim dapat menilai kesalahan korporasi bila korporasi memperoleh manfaat, membiarkan, atau tidak melakukan langkah pencegahan. ^[50]	Kriteria "tidak melakukan langkah pencegahan" sejalan dengan pemeriksaan sarana-prasarana oleh Polda Sumsel.
UU 1/2023 (KUHP) Pasal 45–49	Korporasi adalah subjek pidana; tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan pemberi perintah, pemegang kendali, atau	Kapolri menyebut penetapan pemilik dan pemegang saham "dalam waktu yang dekat"; belum terwujud per 24 Oktober. ^[6]

Ketentuan	Apa yang diatur	Yang kami catat dalam praktik
	pemilik manfaat di luar struktur organisasi (Pasal 47). ^[52]	
UU 18/2013 (P3H) Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf d, Pasal 94	Larangan membawa alat berat dan menambang di kawasan hutan tanpa perizinan; larangan mendanai perusakan hutan secara langsung atau tidak langsung, dengan pidana tersendiri bagi pendana. ^{[47][53]}	Penyidikan PETI di Bungo memakai Pasal 158 UU Minerba; pemodal masih "diduga". ^[25]
UU 3/2020 (Minerba) Pasal 158	Pidana bagi penambangan tanpa izin.	Pasal yang paling sering dipakai, dan yang paling mudah menjerat operator. ^[25]

Dari tabel itu terlihat bahwa aturan untuk naik ke atas sudah ada di setiap lapis. Untuk karhutla, ada kewajiban pemegang izin, pidana korporasi, dan tanggung jawab mutlak. Untuk PETI, ada pidana bagi pendana dalam UU P3H dan konsep pemilik manfaat dalam KUHP. Untuk Merauke, ada kewajiban kajian lingkungan yang diakui sendiri oleh Wamenko Pangan. Celahnya terletak pada pasal mana yang dipilih penyidik, data siapa yang dipakai untuk menghitung luas, dan apakah daftar perusahaan yang disegel atau disidik dibuka kepada publik.

Siapa menanggung, siapa menikmati

Bagian ini memisahkan dampak yang sudah terdokumentasi dari keuntungan yang hanya dapat kami tunjukkan arahnya. Kami tidak menuduh pihak tertentu memperoleh keuntungan dari kebakaran atau tambang ilegal; kami mencatat siapa yang memegang lahan dan rantai usahanya.

Tabel 9. Beban dan manfaat yang tercatat

Pihak	Yang ditanggung atau dinikmati	Rujukan
Dua petani lansia di Tanjung Jabung Barat	Ditahan sejak September; salah satunya menurut BBC menderita stroke dan sakit jantung.	[8][9]
Warga Jambi dan Sumsel	26.957 kasus ISPA di Jambi pada September; jarak pandang Palembang sempit 25 meter.	[13][17]
Ekosistem Berbak Sembilang	11.339 ha terbakar menurut WALHI Jambi, 2.134 ha di zona inti.	[13]

Pihak	Yang ditanggung atau dinikmati	Rujukan
Penambang di Solok Selatan	Empat orang tewas tertimbun longsor pada 6 Oktober.	[32]
Masyarakat adat Tamiai	Sungai Penetai keruh, ikan menghilang menurut warga; laporan sejak 2022 belum menghentikan tambang.	[28]
Warga Merauke	Tanggap darurat asap untuk 22 distrik sejak 20 Oktober.	[43]
Pemegang konsesi yang terbakar	Lahan terbuka di dalam konsesi; sanksi yang dijatuhkan sejauh ini sebagian besar pembekuan dan teguran, bukan pencabutan.	[7][11]
Pemodal dan pemilik alat berat PETI	Hasil emas tanpa sewa lahan di dalam taman nasional, menurut penambang yang diwawancarai Mongabay; identitas masih inisial atau tidak diketahui.	[28][25]
Rantai pasok sawit	Empat grup (RGE, Sinar Mas, Musim Mas, Wilmar) menguasai 52% volume ekspor 2024; pasar domestik terhubung dengan dua pertiga deforestasi sawit.	[44]

Ketimpangannya terletak pada siapa yang menanggung risiko hukum. Petani, operator, dan pendulang berada di lokasi dan mudah ditangkap. Pemegang izin, pemodal, dan pengampu proyek berada di kantor, dan untuk menjangkau mereka penyidik harus menyusun bukti tentang kewajiban yang dilalaikan atau aliran dana. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring merumuskan akibatnya: selama pertanggungjawaban berhenti pada entitas operasional, aktor yang mengendalikan dan menikmati manfaat dari penguasaan lahan berisiko tetap luput dari penegakan hukum.^[40]

Yang terus kami pantau

- Rilis identitas 13 tersangka korporasi oleh Polri, termasuk korporasi PMA, dan apakah pemilik atau pemegang saham benar ditetapkan sebagai tersangka.
- Nama lengkap 20 korporasi yang disidik Polda Sumsel, serta apakah badan hukum PT RAS, bukan hanya direkturnya, berstatus tersangka.
- Penetapan tersangka korporasi pertama di Jambi, hasil pemeriksaan PT Rimba Hutani Mas, dan nasib permohonan penangguhan penahanan AK.

- Daftar 12 perusahaan yang disegel KLH di Sumatera Selatan yang dijanjikan Gubernur akan dipublikasikan.
- Daftar tunggal 32 perusahaan yang dikenai sanksi Kemenhut, dan apakah ada pembekuan yang naik menjadi pencabutan.
- Sidang MK perkara 307/PUU-XXIV/2026 pada 2 November 2026, terutama keterangan ahli Pemerintah tentang Pasal 88.
- Penangkapan terduga pemodal PETI Bungo, dan apakah penyidik memakai pasal pendanaan atau pencucian uang.
- Hasil penyelidikan Polda Jambi di Sungai Penetai dan konfirmasi BBTNKS tentang lokasi tambang di dalam taman nasional.
- Tanggapan resmi KLH, Kemenko Pangan, dan Kementan atas 674 titik panas di klaster Food Estate Merauke.
- Angka luas karhutla nasional Agustus–Oktober 2026 dari SiPongi.

Jadi, apa artinya?

Pekan ini negara menunjukkan bahwa ia bisa bergerak ke atas: satu direktur di Sumatera Selatan, 13 tersangka korporasi secara nasional, 32 perusahaan dengan sanksi administratif. Kami mencatat kemajuan itu. Tetapi jarak antara bawah dan atas masih lebar. Data Polri per 20 Oktober memperlihatkan bahwa tersangka perorangan rata-rata berhadapan dengan sekitar 24 hektare lahan terbakar, sedangkan tersangka korporasi dengan sekitar 2.272 hektare (hitungan FGI). Dua petani lansia di Jambi ditahan sejak awal September, sementara pemeriksaan perusahaan pemegang izin di lokasi yang sama baru dijanjikan. Di Sungai Penetai, empat tahun laporan menghasilkan vonis bagi pekerja dan inisial bagi pemodal. Di Merauke, 674 titik panas di lahan yang diampu negara dijawab dengan janji pengetatan.

Aturannya sudah ada. Yang menentukan adalah apakah aturan itu dipakai sampai ke lapis paling atas, dan apakah publik diberi data untuk mengujinya. Selama nama perusahaan yang disegel dan disidik tidak dibuka, angka luas terbakar resmi sepuluh kali lebih kecil dari angka citra satelit, dan pasal pendanaan tidak dipakai untuk PETI, frasa "tajam ke bawah, tumpul ke atas" akan terus terdengar, kali ini juga dari mulut menteri.

Pintu masuk advokasi

- Keterbukaan informasi: mengajukan permohonan informasi publik kepada KLH, Kemenhut, dan Polda Sumsel atas daftar perusahaan yang disegel, disanksi, dan disidik. Gubernur Sumsel sudah berjanji daftar perusahaan yang disegel akan dipublikasikan.^[19]

- Mahkamah Konstitusi: menyampaikan keterangan tertulis atau dukungan sebagai pihak terkait dalam perkara 307/PUU-XXIV/2026 tentang pentingnya frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" bagi gugatan karhutla.
- DPRD Jambi: mendorong panitia khusus karhutla meminta data luas terbakar per konsesi dan memanggil pemegang izin yang konsesinya terbakar berulang, sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata, "jangan ada tebang pilih".^[22]
- Pendampingan hukum: mendukung permohonan penangguhan penahanan dan pembelaan bagi petani yang ditahan, sambil mendesak pemeriksaan pemegang PBPH berjalan bersamaan.
- PETI: mendesak Polda Jambi memakai Pasal 19 huruf d dan Pasal 94 UU P3H serta penelusuran aset terhadap pemodal, dan meminta BBTNKS menerbitkan peta resmi lokasi tambang di dalam TNKS.
- Merauke: mendesak KLH memeriksa klaster Food Estate dengan standar yang sama seperti konsesi swasta, termasuk pemeriksaan dokumen kajian lingkungan yang disebut Wamenko Pangan.
- Gugatan perdata: menyiapkan bahan untuk gugatan lingkungan atas konsesi yang terbakar berulang, dengan data citra satelit dan luas terbakar per konsesi.

Catatan

- [1] Kompas.com, "Polda Sumsel Tetapkan Direktur Operasional PT RAS Tersangka Karhutla", 15 Oktober 2026. <https://regional.kompas.com/read/2026/10/15/212443778/polda-sumsel-tetapkan-direktur-operasional-pt-ras-tersangka-karhutla-15>
- [2] ANTARA Foto, "Rilis penanganan kasus karhutla di Sumsel", 15 Oktober 2026. <https://www.antarafoto.com/id/view/2885521/rilis-penanganan-kasus-karhutla-di-sumsel>
- [3] detikSumbagsel, "Polda Sumsel Tangani 20 Korporasi Terkait Karhutla, Ada 4 Penambahan", 21 Oktober 2026. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8717614/polda-sumsel-tangani-20-korporasi-terkait-karhutla-ada-4-penambahan>
- [4] ANTARA Jambi, "Polda Jambi tangani 18 laporan karhutla, tetapkan 16 tersangka", 13 Oktober 2026. <https://jambi.antaranews.com/berita/669702/polda-jambi-tangani-18-laporan-karhutla-tetapkan-16-tersangka>
- [5] detikSumbagsel, "Karhutla Jambi Capai 4.363 Hektare, 18 Orang Jadi Tersangka", 19 Oktober 2026. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8712869/karhutla-jambi-capai-4-363-hektare-18-orang-jadi-tersangka>
- [6] Kompas.com, "Polri Tetapkan 11 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya Perusahaan Asing", 21 Oktober 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/10/21/20023401/polri-tetapkan-11-korporasi-jadi-tersangka-karhutla-3-di-antaranya>
- [7] Kementerian Kehutanan, Siaran Pers SP.631/HKLN/10/2026, "Menhut Raja Juli Antoni Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla, Total 32 Perusahaan Dikenai Sanksi", 21 Oktober 2026. <https://www.kehutan.go.id/news/menhut-raja-juli-antoni-bekukan-izin-enam-perusahaan-terkait-karhutla-total-32-perusahaan-dikenai-sanksi>
- [8] BBC News Indonesia, liputan dua petani tersangka karhutla di Jambi, M. Sobar Alfahri, 29 September 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqx2zxwwl548o>
- [9] Ditjen Gakkum Kehutanan, "Kemenhut Tetapkan Dua Tersangka Pembakaran dan Penguasaan Kawasan Hutan secara Tidak Sah di Jambi", 6 September 2026. <https://gakkum.kehutan.go.id/siaran-pers/detail/kemenhut-tetapkan-dua-tersangka-pembakaran-dan-penguasaan-kawasan-hutan-secara-tidak-sah-di-jambi>
- [10] Tribratanews Polri, "Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka Karhutla Korporasi, 223 Orang Dijerat Kasus Perorangan", 14 Oktober 2026. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bareskrim-tetapkan-9-tersangka-karhutla-korporasi-223-orang-dijerat-kasus-perorangan-107209>
- [11] ANTARA Jambi, "Karhutla, Kemenhut bekukan 13 izin dan cabut lima PBPH", 29 September 2026. <https://jambi.antaranews.com/berita/668496/karhutla-kemenhut-bekukan-13-izin-dan-cabut-lima-pbph>
- [12] SiPongi Kementerian Kehutanan, "Indikasi Luas Kebakaran", diakses 19 Oktober 2026. <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- [13] Mongabay Indonesia, "Gambut Jambi Terus Membara, Derita Warga Terpapar Kabut Asap", Sapariah Satri, 15 Oktober 2026. <https://mongabay.co.id/2026/10/15/gambut-jambi-terus-membara-derita-warga-terpapar-kabut-asap/>
- [14] Kompas.com, "Karhutla di Jambi Tembus 42.455 Hektare, Gambut dan Kawasan Konservasi", 10 Oktober 2026. <https://regional.kompas.com/read/2026/10/10/140054778/karhutla-di-jambi-tembus-42455-hektare-gambut-dan-kawasan-konservasi>
- [15] Mongabay Indonesia, "7 Kabupaten di Sumatera Selatan Terus Terbakar, Rawa Gambut Kembali Membara", Taufik Wijaya, 12 Oktober 2026. <https://mongabay.co.id/2026/10/12/7-kabupaten-di->

sumatera-selatan-terus-terbakar-rawa-gambut-kembali-membara/

[16] CNN Indonesia, "473 Hotspot di OKI Jadi Sumber Kabut Asap Tebal Palembang Pagi Ini", 18 Oktober 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261018093740-20-1416627/473-hotspot-di-oki-jadi-sumber-kabut-asap-tebal-palembang-pagi-ini>

[17] Kompas.com, "BPBD Sumsel Sebut Kabut Asap Palembang Mulai Berkurang Usai Penyemaian", 17 Oktober 2026. <https://regional.kompas.com/read/2026/10/17/160000978/bpbd-sumsel-sebut-kabut-asap-palembang-mulai-berkurang-usai-penyemaian-2-4>

[18] detikSumbagsel, "Hotspot di Lahan Gambut Sumsel Capai 1.038 Titik", 22 Oktober 2026. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8718471/hotspot-di-lahan-gambut-sumsel-capai-1-038-titik>

[19] ANTARA, "Kementerian LH segel 12 perusahaan di Sumsel terkait karhutla", 7 Oktober 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5775665/kementerian-lh-segel-12-perusahaan-di-sumsel-terkait-karhutla>

[20] ANTARA Sumsel, "Polda Sumsel segel 620 hektare lahan konsesi korporasi terindikasi karhutla", 16 Oktober 2026. <https://sumsel.antaranews.com/berita/826181/polda-sumsel-segel-620-hektare-lahan-konsesi-korporasi-terindikasi-karhutla>

[21] Sumselupdate, "Polda Sumsel Selidiki 16 Korporasi Kasus Karhutla, Direktur Operasional PT RAS Jadi Tersangka", 15 Oktober 2026. <https://sumselupdate.com/polda-sumsel-selidiki-16-korporasi-kasus-karhutla-direktur-operasional-pt-ras-jadi-tersangka/>

[22] detikSumbagsel, "DPRD Jambi Kaji Pansus Karhutla, Kebakaran di Wilayah Konsesi Jadi Sorotan", 15 Oktober 2026. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8707242/dprd-jambi-kaji-pansus-karhutla-kebakaran-di-wilayah-konsesi-jadi-sorotan>

[23] Ditjen Gakkum Kehutanan, "Kementerian Kehutanan Kenakan Sanksi Administratif terhadap 32 Perusahaan Terkait Karhutla", 19 Oktober 2026, <https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/detail/kementerian-kehutanan-kenakan-sanksi-administratif-terhadap-32-perusahaan-terkait-karhutla-proses-pidana-berjalan-terhadap-125-subjek-hukum> ; Kompas.com, "Dua Perusahaan di Jambi Dibekukan Kemenhut Terkait Karhutla", 19 Oktober 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/10/19/212422378/dua-perusahaan-di-jambi-dibekukan-kemenhut-terkait-karhutla>

[24] Kementerian Kehutanan, "Menhut Akan Sanksi Lagi 5-6 Perusahaan Terlibat Karhutla", 12 Oktober 2026. <https://www.kehutanan.go.id/pers/menhut-akan-sanksi-lagi-5-6-perusahaan-terlibat-karhutla>

[25] ANTARA, "Polda Jambi telusuri dua terduga pemodal tambang emas ilegal di Bungo", 16 Oktober 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5791213/polda-jambi-telusuri-dua-terduga-pemodal-tambang-emas-ilegal-di-bungo>

[26] Bidhumas Polda Jambi, "Polda Jambi Gelar Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal di Bungo", 16 Oktober 2026. <https://tribratanews.jambi.polri.go.id/berita/polda-jambi-gelar-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-dugaan-tambang-emas-ilegal-di-bungo>

[27] Kayonews, "Polda Jambi Selidiki Dugaan PETI Skala Besar di TNKS Kerinci", 17 Oktober 2026. <https://kayonews.co.id/polda-jambi-selidiki-dugaan-peti-skala-besar-di-tnks-kerinci/>

[28] Mongabay Indonesia, "Tambang Emas Ilegal Jambi Jarah Hutan Warisan Dunia", Richaldo Hariandja, 10 Juli 2026. <https://mongabay.co.id/2026/07/10/tambang-emas-ilegal-jambi-jarah-hutan-warisan-dunia/>

[29] Sekato.id, "Informasi Operasi Sempat Bocor, Polres Kerinci Amankan 4 Orang Diduga Pelaku PETI", 1 Desember 2022. <https://sekato.id/informasi-operasi-bocor-polres-kerinci-amankan-4-orang-diduga-pelaku-peti/>

- [30] Pulitzer Center/Kompas.com, "Mengurai Aktor Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional", 14 Maret 2024. <https://pulitzercenter.org/id/stories/mengurai-aktor-tambang-emas-ilegal-di-taman-nasional>
- [31] KKI Warsi, "Hutan Jambi di Ambang Krisis Ekologis", 7 Januari 2026. <https://warsi.or.id/hutan-jambi-di-ambang-krisis-ekologis/>
- [32] Langgam.id, "Longsor Tambang Ilegal Solok Selatan, Polisi Sebut Tidak Ada Penggunaan Alat Berat", 9 Oktober 2026, <https://langgam.id/longsor-tambang-ilegal-selok-selatan-polisi-sebut-tidak-ada-penggunaan-alat-berat/> ; Mongabay Indonesia, "Empat Penambang Emas Tewas Tertimbun Longsor di Sumbar", 16 Oktober 2026, <https://mongabay.co.id/2026/10/16/empat-penambang-emas-tewas-tertimbun-longsor-di-sumbar/>
- [33] Kompas.id, "Empat Orang Tewas dalam Longsor Tambang Emas Ilegal di Solok Selatan", Yola Sastra, 9 Oktober 2026, <https://www.kompas.id/artikel/empat-orang-tewas-dalam-longsor-tambang-emas-ilegal-di-selok-selatan-tak-ada-keterangan-dari-polisi> ; Posmetro Padang, 10 Oktober 2026, <https://posmetropadang.co.id/aktivitas-peti-selok-selatan-kembali-makan-korban-4-penambang-tewas-tertimbun-longsor-tebing-kadis-esdm-sumbar-sebut-ada-penggunaan-eksavator-tapi-dibantah-kapolres-437818/>
- [34] Kompas.com, "Keragaman Hayati Taman Nasional Kerinci Seblat Terancam Tambang Emas Ilegal", 8 Januari 2024, <https://regional.kompas.com/copy/2024/01/08/150833578/keragaman-hayati-taman-nasional-kerinci-seblat-terancam-tambang-emas-ilegal> ; dimuat ulang FWI, 9 Januari 2024, <https://fwi.or.id/keragaman-hayati-tn-kerinci-terancam-tambang-emas-ilegal/>
- [35] Harian Singgalang, "Tambang Emas Ilegal Digerebek di TNKS Pessel, 7 Mesin dan 37 Tenda Dimusnahkan", 25 Juni 2026. <https://www.hariansinggalang.co.id/berita/244231/tambang-emas-ilegal-digerebek-di-tnks-pessel-7-mesin-dan-37-tenda-dimusnahkan>
- [36] TribunPadang, "20 Rumah Rusak Berat Akibat Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan, Air PDAM Masih Terputus", 14 Oktober 2026. <https://padang.tribunnews.com/sumatera-barat/179500/20-rumah-rusak-berat-akibat-banjir-dan-longsor-di-pesisir-selatan-air-pdam-masih-terputus>
- [37] Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan, "Profil Taman Nasional Kerinci Seblat". <https://ksdae.kehutan.go.id/kawasan-konservasi/100241006/>
- [38] UNESCO World Heritage Centre, "Tropical Rainforest Heritage of Sumatra" (ref. 1167). <https://whc.unesco.org/en/list/1167/>
- [39] RRI Sungai Penuh, "BBTNKS Perketat Pengawasan, Putus Mata Rantai PETI di Kawasan TNKS", 3 Juli 2026, <https://rri.co.id/sungaipenuh/berita-lain/2542596/bbtnks-perketat-pengawasan-putus-mata-rantai-peti-di-kawasan-tnks> ; TVRI Jambi, 7 Juli 2026, <https://jambi.tvrinews.com/berita/tn8eos1-tiga-lokasi-peti-di-kawasan-tnks-jambi-dan-sumbar-ditertibkan>
- [40] WALHI, "Kajian Peta Aktor: Siapa di Balik Api?" dan siaran pers peluncuran, 14 Oktober 2026. <https://www.walhi.or.id/kajian-peta-aktor-siapa-di-balik-api> ; PDF: <https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI%202025-2029/Dokumen/Peta%20Aktor%20Karhutla%202026%20%28ID%29.pdf>
- [41] Suara Papua, "WALHI Temukan 807 Titik Panas di Kawasan PSN Merauke", 15 Oktober 2026, <https://suarapapua.com/2026/10/15/walhi-temukan-807-titik-panas-di-kawasan-psn-merauke/> ; TrenAsia, "Jejak First Resources dan Wilmar di Balik Titik Panas Merauke", 15 Oktober 2026, <https://www.trenasia.id/tren-global/jejak-first-resources-dan-wilmar-di-balik-titik-panas-merauke>
- [42] Katadata, "Proyek Pangan 1990-an Rusak Gambut Kalteng, Kini Merauke Dikepung Titik Panas" dan "Wamenko Pangan akan Perhatikan Temuan Titik Panas di Area PSN Papua Selatan", Ajeng Dwita Ayuningtyas, 16 Oktober 2026. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6ad1d18e42986/proyek-pangan-1990-an-rusak-gambut-kalteng-kini-merauke-dikepung->

titik-panas ; <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6ad1e7211fead/wamenko-pangan-akan-perhatikan-temuan-titik-panas-di-area-psn-papua-selatan>

[43] MataPapua, "Pemkab Merauke Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan", 21 Oktober 2026. <https://www.matapapua.com/pemkab-merauke-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana-kebakaran-hutan-dan-lahan>

[44] Trase, "Two-thirds of palm oil deforestation in Indonesia linked to domestic demand", 13 Oktober 2026, <https://trase.earth/media/press-release/two-thirds-of-palm-oil-deforestation-in-indonesia-linked-to-domestic-demand> ; Trase, "Deforestasi dan ekspor minyak sawit Indonesia", 13 Oktober 2026, <https://trase.earth/insights/deforestasi-dan-ekspor-minyak-sawit-indonesia-2026>

[45] Polres Solok Selatan, "Polisi Gerebek Tambang Emas Ilegal di Solok Selatan, Ekskavator Disita", 14 Juni 2026. <https://solsel.polres.id/polisi-gerebek-tambang-emas-ilegal-di-solok-selatan-ekskavator-disita>

[46] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, teks asli (JDIH Kementerian Keuangan).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2009/32TAHUN2009UU.htm>

[47] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 22 angka 33 (Pasal 88 UU 32/2009), perubahan UU 41/1999 dan UU 18/2013. <https://peraturan.go.id/files/uu-no-6-tahun-2023.pdf>

[48] Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, 20 Oktober 2026. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/15130_Risalah-pdf_PERMOHONAN%20NOMOR%20307.PUU-XXIV.2026%20tgl.%20%2020%20Oktober%202026%20.pdf

[49] Mahkamah Konstitusi, berita perkara 307/PUU-XXIV/2026 dan pelacak perkara; risalah sidang 9 September, 5 Oktober, dan 12 Oktober 2026. <https://www.mkri.id/berita/solidaritas-perempuan-perbaiki-uji-uu-cipta-kerja-menyual-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-25721> ; <https://tracking.mkri.id/index.php?id=307%2FPUU-XXIV%2F2026&page=web.TrackPerkara>

[50] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/203789/Perma%20Nomor%2013%20Tahun%202016.pdf>

[51] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, teks asli.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/33873/UU%20Nomor%2041%20Tahun%201999.pdf>

[52] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>

[53] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20130807/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202013.pdf

[54] ANTARA, "Kapolri ungkap 243 orang dan 13 korporasi jadi tersangka karhutla", 23 Oktober 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5807667/kapolri-ungkap-243-orang-dan-13-korporasi-jadi-tersangka-karhutla> ; Kompas.com, "Kapolri Ungkap 243 Orang-13 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, Asing Terlibat", 23 Oktober 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/10/23/16223981/kapolri-ungkap-243-orang-13-korporasi-jadi-tersangka-karhutla-asing-terlibat>

[55] ANTARA Sumsel, "Polisi perdalam penyidikan ilmiah ungkap kasus karhutla di Sumsel", 24 Oktober 2026, <https://sumsel.antaranews.com/berita/826655/polisi-perdalam-penyidikan-ilmiah-ungkap-kasus-karhutla-di-sumsel> ; KoranSN, "Polda Sumsel Perluas Pengusutan Karhutla, 20 Korporasi Masuk Penyidikan", 23 Oktober 2026, <https://koransn.com/polda-sumsel-perluas-pengusutan-karhutla-20->

korporasi-masuk-penyidikan/

[56] iNews, "Greenpeace Sebut Karhutla Indonesia Capai 1,9 Juta Hektare, Data Pemerintah 202.010 Hektare", 22 Oktober 2026. <https://www.inews.id/news/nasional/greenpeace-sebut-karhutla-indonesia-capai-19-juta-hektare-data-pemerintah-202010-hektare>